

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karimunjawa

a. Penyuluhan

1. Apakah penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak sering dilakukan?
2. Bagaimanakah bentuk/model penyuluhannya ?
3. Apakah penyuluhan tersebut mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat?
4. Apakah sudah ada sosialisasi tentang pembayaran PBB secara online?

b. Pelayanan

1. Apakah pelayanan yang diberikan oleh pegawai telah memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku wajib pajak?
2. Bagaimana keramahan, kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan?
3. Apakah prosedur dalam pendaftaran hingga pembayaran PBB menyulitkan wajib pajak?
4. Bagaimana kejelasan informasi pelayanan yang diberikan ?
5. Bagaimana kecepatan pelayanan yang diberikan oleh petugas ?
6. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ?

c. Pemeriksaan

1. Bagaimana model/bentuk pemeriksaan terhadap wajib pajak ?

2. Apakah selalu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan SPT oleh wajib pajak telah diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya ?
3. Apakah sering terjadi kesalahan dalam pemeriksaan ?

Sistematika Fiskus

a. Pendaftaran Wajib pajak

1. Bagaimana alur/prosedur pendaftaran wajib pajak ?
2. Apakah terjadi peningkatan jumlah wajib pajak tiap tahunnya?
3. Apa indikator yang menentukan jumlah wajib pajak meningkat?

b. Pelaporan SPT

1. Apakah masyarakat selaku wajib pajak telah lihai alam pengisian dan pelaporan SPT?
2. Bagaimana sikap pegawai dalam menanggapi wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SPT?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan SPT?

c. Penghitungan Pajak

1. Bagaimana kemampuan wajib pajak dalam melakukan penghitungan pajaknya?
2. Apakah ada kesulitan yang dialami oleh wajib pajak selama menghitung pajaknya sendiri?

d. Pembayaran Pajak

1. Bagaimana mekanisme pemungutan PBB?
2. Bagaimana ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar pajaknya?
3. Apakah terjadi peningkatan tiap tahunnya dalam pembayaran PBB oleh wajib pajak?

4. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar?
5. Apakah masih ada wajib pajak yang melakukan penunggakan ?
6. Apakah yang menyebabkan masyarakat selaku wajib pajak lalai dalam membayar pbb?
7. Apakah surat tunggakan selalu diberikan kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pbb?
8. Bagaimana alur/prosedur untuk wajib pajak yang ingin mengajukan pengurangan PBB?

HASIL WAWANCARA

Informan : Bahrudin, ST, MM

Jabatan : Anggota Tim Monitoring Pemungutan PBB-P2

Peneliti :”Assalamu’alaikum pak. Saya Dwi Ratna Susanti dari UNISNU, mau mewawancarai bapak mengenai skripsi saya pak.”

Informan :”Ya, mbak.”

Peneliti :”Ya pak. Terimakasih. Apakah penyuluhan tentang membayar pajak tepat waktu sering dilakukan?”

Informan :”Kira-kira kalau di kecamatan Karimunjawa penyuluhannya itu berkisar dua kali di awal tahun mendekati batas akhir dari pemungutan pajak dan di awal tahun ketika akan pembagian SPT-nya.”

Peneliti :”Kalau bentuk atau model penyuluhannya itu bagaimana pak?”

Informan :”Bentuk atau model penyuluhannya kita sosialisasi dengan petinggi, perangkat, dan carik di masing-masing desa. Kalau kita biasanya didatangkan di kecamatan Karimunjawa, tetapi ketika kita ada acara kita bisa melakukan sosialisasi sama seperti yang ada di Kecamatan.”

Peneliti :”Tanggapan masyarakatnya terhadap penyuluhan itu seperti apa pak?”

- Informan :“Yang ikut biasanya dari perangkat, petinggi dan carik kalau masyarakatnya biasanya diambil dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka sih biasanya ya berharap kalau ada penyuluhan seperti pajak bumi karena kadang mereka yang sekarang ini pajak bumi dan bangunan bisa online, mereka lebih mudahnya begitu biar tidak cuma menggantungkan dari tarikan dari perangkat desa saja.”
- Peneliti :”Kalau masyarakat kira-kira sudah mengetahui prosedurnya yang pembayaran secara online apa belum ya pak?”
- Informan :“Sebagian sudah ada, biasanya mereka yang punya HP android sudah mencoba tapi kalau yang bapak-bapak ibu-ibu yang sudah sepuh itu kemungkinan ndak bisa, biasanya ya tetap didatangi dari perangkat yang dari desa.”
- Peneliti : “Apakah pelayanan yang diberikan oleh pegawai pemungut pajak ini sudah memberikan kepuasan kepada wajib pajak?”
- Informan :“Standar sih, kalau pemungutan pajak kan dari perangkat mendatangi rumah ke rumah warga desa terus meminta atau menyerahkan SPT meminta uang pajaknya. Kadang mereka yang warga masyarakat menunda pembayaran menunggu hasil laut atau hasil kebun sudah ada.”
- Peneliti :“Kalau keramahan terus kesopanan petugas ini bagaimana pak dalam memberikan pelayanan?”
- Informan :“Standar. Ya Cuma datang kemudian menagih.”

- Peneliti :“Kalau prosedur dalam pendaftarannya gimana ini pak hingga pembayaran apakah menyulitkan atau mudah ini pak?”
- Informan : “Prosedur pendaftaran apa ini maksudnya?”
- Peneliti :“Wajib pajak misalnya ada wajib pajak yang baru?”
- Informan :“O.. Wajib pajak baru, itu lapor ke pak carik atau pak petinggi ya biasanya ke perangkat ke petinggi nanti pak petinggi bikin surat ke KPP untuk membuat pajak yang apa itu pajak baru.”
- Peneliti : “Kalau yang mengenai kejelasan informasi yang diberikan pak, misalnya penagihan dan lain sebagainya itu apakah warganya juga diberikan informasi-informasi tertentu gitu pak.”
- Informan :“Kalau informasi tertentu sih ndak ya. Standar saja dari desa, biasanya desa menarik SPT itu ya sesuai yang diberikan dari kabupaten atau kecamatan terus desa meneruskan ke *by name*-nya warga masyarakat.”
- Peneliti :“Mengenai ketepatan pelayanan bagaimana pak?”
- Informan :“Kecepatan pelayanan ya kalau yang SPT nya sudah ada biasanya langsung diedarkan ke warga masyarakat kadang yang warga masyarakatnya pembayarannya menunggu ketika mereka itu ada uang lebih atau ada uang untuk membayar. Tapi kalau dari kecamatan atau dari desa ketika SPT ya langsung diserahkan kepada masyarakat.”
- Peneliti :“Mengenai kondisi sarana prasarana itu bagaimana pak?”

Informan :“Tidak spesifik ya. Karena pajak kalau ingin membayar ke kantor desa menemui perangkat yang sudah dipasrahi SPTnya itu langsung ke balai desa.”

Peneliti : “Selanjutnya pak ini mengenai pemeriksaan itu bagaimana ya pak itu bentuk atau model pemeriksaannya terhadap wajib pajak itu.’

Informan :“Pemeriksaan....?”

Peneliti :“Kalau misalnya wajib pajak tersebut mempunyai objek pajak yang baru dan sebagainya itu lho pak?”

Informan :“Oh klo biasanya komplainnya itu dari warga masyarakat kalau dri desa ya ngertinya dari SPT terus diteruskan kepada masyarakat. Kalau desa misalnya ngecek lho kok yang bidang ini belum ada pajaknya, desa ngecek di buku C desa. Misale ini punyanya siapa punyanya siapa. Tapi kalau biasanya complain-komplain itu dari warga masyarakat, mungkin komplainnya itu dari warga masyarakat ketika mau jual beli, biasanya kalau jual beli ditanya pajaknya. Klo nggak punya mereka baru dating. Tapi kalau desa begitu ada SPT ya diberikan kepada masyarakat, masyarakat bayar biasa.”

Peneliti : “Klo ini pemeriksaan itu SPTnya itu telah diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya itu pemeriksaannya bagaimana?”

Informan : “Kalau sesuai dengan keadaan sebenarnya ya sudah, selain itu kalau ndak ada komplain ya ndak apa-apa sih.”

- Peneliti : “Berarti itu terjadinya kesalahan dalam pemeriksaan bagaimana pak?”
- Informan : “Itu bisa saja kesalahan tapi itu biasanya dari komplain-komplain masyarakat. Ketika mereka membutuhkan pajaknya kok ndak ada atau mungkin dari yang perangkat belum ada pajaknya ya bisa. Tapi kalau di pemeriksaan rutin, dijlimeti sih nggak, kita insidentil lah klo untuk pemeriksaannya.”
- Peneliti : “Kalau untuk alur proses pendaftarannya, bagi wajib pajak yang baru tadi bagaimana pak?”
- Informan : “Dari wajib pajak biasanya ke perangkat atau ke carik, lha nanti dikumpulkan yang baru-baru pengajuan ke kantor pajak pratama.”
- Peneliti : “Kalau jumlah wajib pajaknya meningkat atau bagaimana pak?”
- Informan : ”Kalau jumlah wajib pajak ini kalau tidak ada pemecahan dari SPT nya ya tidak meningkat. Tapi kalau ada pemecahan misalnya, ortunya sudah meninggal, terus dibagi ke anaknya ya mungkin tiap bidang itu ganti namanya saja tapi aslinya ya dari orang sat uterus dibagi misalnya anaknya punya 2 atau 3. Lha itu bisa saja nanti jumlah wajib pajaknya meningkat.”
- Peneliti : “Kalau misalnya pelaporan SPT-nya pak, bagaimana? Apakah juga di desa atau wajib pajak sendiri yang melaksanakan pelaporan SPT-nya.”
- Informan : “Di desa nanti pak petinginya meneruskan ke Kabtor Pajak Pratama dan ke BPKAD. Kalau dari penduduk yang dari BPKAD

kok jarang soalnya kita dari Karimun jauh. Mending masyarakat pasrah ke desa. Biasanya gitu.”

Peneliti : “Kalau tingkat kepatuhan wajib pajaknya ini pak, dalam pelaporan SPT-nya itu bagaimana pak?”

Informan : “Kalau yang seperti itu yang penduduk yang masih ada di Karimun itu biasanya tertib membayar walaupun menunggu ketika ada uang atau habis panen. Tapi kalau yang orangnya tidak ada misalnya orang luar tapi membeli tanah disini jadi kalau kita dari desa untuk menagihnya itu sulit.”

Peneliti :” Kalau kemampuan wajib pajak dalam menghitung pajak sendiri itu bagaimana pak?”

Informan :”Maksudnya menghitung pajak sendiri itu...?”

Peneliti :”Apakah masyarakat sudah tahu tarif pajaknya kalau misalnya PBB itu segini, dengan luas segini kena tariff segini.”

Informan :”O.. Mereka manut saja nggak komplain. Yang sudah ada ya segitu aja.”

Peneliti :”Brarti langsung dari yang sudah dihitung tadi masyarakat menerima dan siap membayar pajak gitu ya pak?”

Informan :”Ya. Mereka menerima.”

Peneliti :”Kalau mekanismenya pak, itu misalnya pemungutan PBB nya seperti apa ya pak?”

Informan :”Dari SPT yang dari kabupaten lewat kecamatan. Terus kecamatan penyerahan dari desa masing-masing, lha masing-masing desa

dibagi ke perangkat yang membawahi wilayahnya. Jadi misalnya satu perangkat bisa dapat 50 wajib pajak atau lebih atau malah kurang ya tergantung wilayah perangkatnya. Jadi tiap perangkat masing-masing sudah dipasrahi.”

Peneliti :”Kalau wajib pajaknya membayar pajaknya itu biasanya tepat waktu atau banyak yang molor dari target pak?”

Informan :”Ya seperti tadi, kalau yang ada di karimun itu membayarnya inshaallah gak sek molor-molor, melebihi batas waktu 31 Agustus itu ndak. Tapi kalau yang wajib pajaknya tidak ada di Karimun mereka cuma membeli tanah, trus habis itu cuma dibuat investasi lha itu kadang malah tidak membayar. Pajaknya itu kita yang dari desa kesulitan untuk menariknya atau menagihnya.”

Peneliti :”Tren nya meningkat apa tidak ya pak pembayaran PBB ini?”

Informan :”Ya meningkat. Tiap tahun meningkat. Ini malah kayaknya hampir 100% yang tahun ini jumlah penarikan PBB.”

Peneliti :”Kalau sanksi bagi yang menunggak itu ada apa tidak pak?”

Informan :”Ndak ada sanksi. Cuma biasanya mereka mengurus administrasi di desa atau kecamatan di cek oleh perangkat desanya apakah sudah atau belum membayar pajak, kalau orang tersebut belum membayar pajak maka administrasinya sementara tidak diteruskan. Dan disuruh membayar pajak dulu. Biasanya begitu. Tapi kalau sanksi-sanksi kayaknya sampai saat ini belum ada.”

Peneliti :”Berarti kalau masyarakat belum membayar pajak dikasih surat tagihan pak?”

Informan :”Ndak. Misalnya dari perangkat sudah angkat tangan untuk menagihnya nanti pak petingginya atau pak cariknya maju untuk menarik pajak. Tapi kalau surat penunggakan selama ini tidak ada.”

Peneliti :”Kalau untuk keberatan membayar pajak trus minta mengajukan pengurangan pajak itu selama ini ada apa ndak ya pak?”

Informan :”Ndak ada. Karena yang di Karimun itu harga jual sama pajaknya itu kadang-kadang memang beda jauh. Jadi mereka kalau untuk membayar pajak ya biasa saja karena harga jualnya tinggi-tinggi. Ndak sebanding sama pajaknya. Pajaknya paling berapa, tapi harga jual sekarang karena wisatanya lancer jadi harga disana untuk objek tanahnya mahal-mahal. Untuk keberatan kayaknya ndak ada.’

Peneliti :”Baik, terimakasih pak atas waktu dan informasinya.”

Informan :”Sama-sama mbak.”

HASIL WAWANCARA

- Informan : Wasro, SP
- Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Karimunjawa
- Peneliti :”Assalamu’alaikum pak. Saya Dwi Ratna Susanti dari UNISNU, mau mewawancarai bapak mengenai skripsi di Kecamatan Karimunjawa.”
- Informan :”Apa yang bisa saya bantu mbak?”
- Peneliti :”Ini pak, mengenai pemeriksaan pajak bumi dan bangunan itu seperti apa ya pak kalau di Kecamatan Karimunjawa ini?”
- Informan :”Kalau pemeriksaan pajak sendiri di Kecamatan Karimunjawa jarang terjadi. Apabila hal tersebut terjadi, untuk menanganinya dari pihak kami akan memberikan kesempatan kepada wajib pajak ya akan dilakukan pembetulan.”
- Peneliti :”Prosedur pembetulannya seperti apa pak?”
- Informan :”Pemeriksaan meliputi 3 jenis mbak korespondensi, pemeriksaan kantor, dan pemeriksaan lapangan. Kalau dalam penelitian SPT terdapat kesalahan tulis dan hitung, maka pemeriksa memberitahukan kepada wajib pajak dengan surat. Namun, apabila terhadap SPT pajak yang diduga diisi dengan tidak benar atau terdapat kesalahan pengisian, penyelesaian dilakukan dengan cara pemeriksaan kantor. Itu ya wajib pajak diminta untuk membawa

data yang dibutuhkan ke BPKAD untuk diverifikasi. Selanjutnya, untuk pemeriksaan yang efektif dilakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan di tempat wajib pajak.”

Peneliti :”Barapa lama waktu yang dibutuhkan untuk itu pak?”

Informan :”Kalau manut aturannya pemeriksaan kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu sampai 6 (enam) minggu. Pemeriksaan lapangan, itu ada pemeriksaan lapangan sederhana yang dilaksanakan selama satu bulan kalau diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan kalau pemeriksaan lapangan yang lebih lengkap waktunya dua bulan. Itu masih dapat diperpanjang lagi selama delapan bulan. Tapi di Karimunjava ini selama saya menjadi anggota tim monitoring belum pernah ada.”

Peneliti :”Kalau masyarakat sendiri, sudah mengetahui cara menghitung pajaknya apa belum ya pak?”

Informan :”Rata-rata masyarakat hanya menerima penghitungan yang sudah tertera di SPT-nya. Kalau untuk tata cara penghitungan, kami sudah mensosialisasikan. Tapi kebanyakan masyarakat sudah menerima jumlah yang tertera di SPT.”

Peneliti :”Kalau untuk pembayarannya pak? Apakah wajib pajak membayar tepat waktu?”

Informan :”Untuk desa Parang dan Nyamuk sering tepat waktu. Kalau desa Karimunjava dan desa Kemojan, belum bisa 100%. Ini karena beberapa wajib pajak domisilinya tidak di Karimunjava.”

- Peneliti :”Apakah ada sanksi pak, bagi yang telat membayar pajak?”
- Informan :”Biasanya ketika wajib pajak tersebut hendak mengurus administrasi melalui desa, sebelum diberikan surat pengantar diminta melunasi dulu. Kalau misalnya menunggak pembayaran dikenakan denda dua persen per bulan dari SPPT. Sebabnya denda tersebut ya agar wajib pajak PBB segera membayar kewajibannya sehingga target anggaran yang berasal dari PBB dapat tercapai.”
- Peneliti :”Penyebab keterlambatan membayar pajak itu apa ya pak?”
- Informan :”Penunggakan paling banyak dikarenakan wajib pajak tinggal di daerah lain, tidak memiliki alamat yang jelas, tidak diketahui pemilik tanah sekarang beralamat dimana, sehingga SPPT tidak sampai ke orangnya. Selain itu untuk penduduk asli keterlambatan dikarenakan salah satu faktornya adalah tingkat ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan kesadaran wajib pajak yang masih kurang.”
- Peneliti :”Baik pak, terimakasih informasinya ya pak.”

HASIL WAWANCARA

- Informan : Mu'adz, S.Sos, MH.
- Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karimunjawa
- Peneliti :”Assalamu’alaikum pak. Saya Dwi Ratna Susanti dari UNISNU, mau mewawancarai bapak mengenai skripsi saya di Kecamatan Karimunjawa.”
- Informan :”Silakan mbak.”
- Peneliti :”Kalau untuk PBB pak, apakah di kecamatan Karimunjawa itu sering diadakan penyuluhan pak?”
- Informan :”Setiap tahun. Karimunjawa ini kan memang kecamatan yang unik, di Kabupaten Jepara itu setiap tahun mengadakan. KPP Pratama itu mengadakan sosialisasi khusus di Karimunjawa. Karena disamping Karimunjawa itu terpencil, yang kedua kalinya petugas pajak juga kepengen plesir ke Karimunjawa.”
- Peneliti :”Kalau penyuluhan yang diadakan itu seperti apa?”
- Informan :”Model penyuluhannya itu masih, artinya kolosal, ada pertunjukan, ada apa namanya seperti besok ada acara jalan sehat, malamnya ada pertunjukan seni dan itu diikuti sampai dengan 5 hari, ada pendampingan pengisian SPT online. Jadi Karimunjawa memang diberi porsi khusus untuk perpajakan.”

- Peneliti :”Kalau tanggapan antusiasme masyarakatnya itu tinggi atau bagaimana?”
- Informan :”Karena di Karimunjawa itu banyak pelaku usaha pariwisata, sangat antusias karena memang pelaku usaha disana juga sudah formil. Sudah ada badan hokum, kemudian sudah profesional. Dan mereka rata-rata sudah sadar baca.”
- Peneliti :”Kalau seumpama ya pak, ada wajib pajak yang tidak membayar PBB tepat waktu itu penangannya dari pihak kecamatan seperti apa pak?”
- Informan :”Khusus PBB untuk kecamatan Karimunjawa itu memang sulit bisa terealisasi 100%. Kenapa karena PBB daerah Karimunjawa itu banyak dimiliki bukan domisili Karimunjawa. Ada orang Jogja, ada orang Solo, orang Bandung, Semarang, jadi tagihannya memang mereka sulit. Karena tadi domisilinya tidak di Karimunjawa wajib pajaknya itu melacaknya sulit, sehingga itu nggak bisa realisasinya 100%.”
- Peneliti :”Itu dari keempat desa atau semuanya?”
- Informan :”Khusus desa Karimunjawa sama Kemojan. Itu yang nggak bisa. Tapi kalau misalnya yang kecil seperti Parang, Nyamuk itu gampang. 100% itu gampang. Karena nilainya kecil, kemudian yang punya lahan disana itu meskipun orang luar tapi sudah bekerjasama dengan orang pribumi Nyamuk dan Parang.”

Peneliti :”Kalau yang tadi dalam tanda kutip tidak membayar atau menunggak itu ada upaya ndak pak untuk menarik pajak itu?”

Informan :”Ya tetap. Ada upaya dari kecamatan memang sudah menyurati, kemudian menelusuri ini wajib pajak siapa, alamatnya dimana, tetep dilaksanakan upaya-upaya yang sistematis. Namun lagi-lagi terbentur masalah jarak kemudian misalnya kita tagih domisili Bandung atau Jogja dan seterusnya itu kan tidak ada biaya sampai disana.”

HASIL WAWANCARA

- Informan : Slamet Wijanarko
- Jabatan : Wajib Pajak Desa Karimunjawa
- Peneliti : "Permisi pak. Saya Dwi Ratna Susanti dari UNISNU, mau mewawancarai bapak mengenai skripsi saya di Kecamatan Karimunjawa."
- Informan : "Ya."
- Peneliti : "Yang ingin saya ketahui pak, ini mengenai pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak atau penarik pajak apakah ramah, sopan, atau bagaimana pak?"
- Informan : "Ya. Petugas dari desa ramah kalau penarikan PBB-nya mbak."
- Peneliti : "Kalau prosedurnya pak, untuk misalnya pendaftaran sampe ke pembayaran pajaknya itu menyulitkan wajib pajak atau tidak pak?"
- Informan : "Oh tidak mbak. Biasanya itu pendaftaran kita langsung ke desa nanti ada petugas dari desa yang menangani. Kalau pembayarannya itu ada petugas dari desa itu kerumah-rumah-rumah untuk pembayarannya."
- Peneliti : "Kalau informasi yang diberikan itu jelas pak?"
- Informan : "Sebelum pembayaran itu ada sosialisasi dari desa maupun kecamatan tentang PBB P-2 nya."

- Peneliti :”Kalau sarana prasarana kalau misalnya mau membayar ke desa itu apakah sudah ada tempat khusus untuk membayar pajak itu atau bagaimana pak?”
- Informan :”Biasanya itu dari petugasnya langsung ke rumah-rumah warga, jadi jemput bola.”
- Peneliti :”Kalau bapak sendiri biasanya membayar pajaknya itu tepat waktu atau bagaimana?”
- Informan :”Ya. Alhamdulillah tepat waktu karena sebelum tanggal 31 Agustus sudah bayar.”
- Peneliti :”Berarti belum pernah menunggak ya pak?”
- Informan :”Sampai sekarang belum pernah.”
- Peneliti :”Pernah mengajukan keringanan pak?”
- Informan :”Ndak pernah mbak.”
- Peneliti :”Kalau pajaknya itu dihitung sendiri atau pasrah ke petugasnya untuk menghitung pak?”
- Informan :”Kalau saya ya biasanya pasrah ke petugasnya mbak.”
- Peneliti :”Baik, terimakasih ya pak atas informasinya.”

HASIL WAWANCARA

- Informan : Ali Syafa'at
- Jabatan : Perangkat Desa Parang
- Peneliti : "Assalamu'alaikum pak. Saya Dwi Ratna Susanti dari UNISNU, mau mewawancarai bapak mengenai skripsi saya di Kecamatan Karimunjawa."
- Informan : "Terkait dengan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Desa Parang, itu ada beberapa prosedur yang memang harus dilakukan oleh perangkat-perangkat desa, khususnya yang ditugaskan terutama untuk kamituo yang ada di Desa Parang. Untuk mekanismenya biasanya memang dibagi per wilayah. Terutama di Desa Parang itu ada beberapa wilayah dan ada beberapa kamituo yang ditugaskan untuk jemput bola mengambil pajak bumi dan bangunan serta membagikan struk PBB-nya kepada para warga."
- Peneliti : "Kalau untuk kepatuhan wajib pajaknya di Desa Parang itu bagaimana Pak?"
- Informan : "Kalau dibandingkan dengan Desa Nyamuk, desa sebelah, itu memang kita kalah. Kalau Nyamuk biasanya lebih cepat untuk mencapai 100% dibandingkan dengan Desa Parang. Tapi sebelum tahun yang bersangkutan itu habis, contohnya tahun 2019 itu habis inshaallah sudah tertagih semua. Sudah membayar semua."

- Peneliti :”Berarti ini tidak ada yang menunggak ya pak?”
- Informan :”Jarang-jarang. Hampir tidak ada.”
- Peneliti :”Kalau selama ini apakah ada warga atau wajib pajak yang mengajukan pengurangan terhadap PBB-nya?”
- Informan :”Ya selama ini belum ada mbak. Ee.. masih sesuai dengan itu apa yang tertera dalam struk pajaknya itu ya mbak. Bangunannya berapa, pajak buminya berapa, sudah sesuai. Jarang sekali ada komplai dengan hal tersebut.”
- Peneliti :”Baik pak. Terimakasih.”



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KARIMUNJAWA

Jl. Raya Karimunjawa No 1 Telp. (0297) 312211 Karimunjawa

J E P A R A

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 670/112

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **S. KARNANEJENG RAMADI, S.STP, MH**

NIP : 19780812 199703 1 002

Jabatan : Camat Karimunjawa

Alamat Kantor: Jl. Raya Karimunjawa No. 1 Karimunjawa, Jepara

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **DWI RATNA SUSANTI**

NIM : 161120001881

TTL : Pacitan, 11 Maret 1985

Alamat : Banyuputih, RT.04 RW.01 Kec. Kalinyamatan

Prodi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

PT : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara dengan judul skripsi "**INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KARIMUNJAWA**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karimunjawa, 5 Maret 2020

Camat Karimunjawa,



S. KARNANEJENG R, S.STP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19780812 199703 1 002

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB- P2 TAHUN 2015
KECAMATAN KARIMUNJAWA
S/D BULAN DESEMBER 2015

No	Pokok Ketetapan		Jumlah Penerimaan			SisaPokok	%	Keterangan
	Jml WP	Jml Pokok	Bulan Lalu	Bulan ini	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.738	105.043.647	68.657.805	9.615.278	78.273.083	26.770.564	74.51	
Jumlah	4.738	105.043.647	68.657.805	9.615.278	78.273.083	26.770.564	74.51	

Karimunjawa 31 Desember 2015
 PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUNJAWA



MUH. TAHSIN, SH, MH

J.E.P. Revisi

NIP. 19730810 199803 1 008

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB- P2 TAHUN 2016
KECAMATAN KARIMUNJAWA
S/D BULAN DESEMBER 2016**

No	Desa	Pokok Ketetapan		Jumlah Penerimaan			Sisa Pokok	%	Keterangan
		Jml WP	Jml Pokok	Bulan Lalu	Bulan ini	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Karimunjawa	2.018	104.164.962	88.000.000	0	88.000.000	16.164.962	84.48	
2	Kemujan	1.758	67.027.832	65.105.048	1.172.784	66.277.832	750.000	97.78	
3	Parang	740	24.328.909	24.328.909	0	24.328.909	0	100	LunasTgl 25- 11-2016
4	Nyamuk	225	6.461.328	6.461.328	0	6.461.328	0	100	LunasTgl 01-02-2016
Jumlah		4.741	201.983.031	183.895.285	1.172.784	185.068.069	16.914.962	95.84	

Karimunjawa 31 Desember 2016



DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB- P2 TAHUN 2017
KECAMATAN KARIMUNJAWA
S/D BULAN DESEMBER 2017

No	Desa	Pokok Ketetapan		Jumlah Penerimaan			Sisa Pokok	%	Keterangan
		Jml. WP	Jml Pokok	Bulan Lalu	Bulan ini	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Karimunjawa	2.075	127.137.161	96.600.000	0	96.600.000	30.537.161	75.98	
2	Kemujaan	1.811	86.593.870	82.032.161	4.561.709	108.714.089	0	100	LunasTgl 8-12-2017
3	Parang	740	26.916.812	19.352.278	7.564.534	26.916.812	0	100	LunasTgl 8-12-2017
4	Nyamuk	225	7.426.494	7.426.494	0	7.426.494	0	100	LunasTgl 10-1-2017
Jumlah		4.851	248.074.337	205.410.933	12.126.243	217.537.176	30.537.161	87.46	

Karimunjawa 31 Desember 2017
 SATMATA K. KARIMUNJAWA



DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB- P2 TAHUN 2018
KECAMATAN KARIMUNJAWA
S/D BULAN DESEMBER 2018

No	Desa	Pokok Ketetapan		Jumlah Penerimaan			Sisa Pokok	%	Keterangan
		Jml WP	Jml Pokok	Bulan Lalu	Bulan Ini	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Karimunjawa	2.094	155.971.117	100.720.000	0	100.720.000	55.251.117	64.57	
2	Kemujaan	1.849	102.848.842	90.090.676	0	90.090.676	12.758.166	87.59	
3	Parang	744	29.347.383	29.347.383	0	29.347.383	0	100	LunasTgl 14 - 08-2018
4	Nyamuk	225	7.766.050	7.766.050	0	7.766.050	0	100	LunasTgl 2-1-2018
Jumlah		4.912	295.933.392	227.924.109	0	227.924.109	68.009.283	77.01	

Karimunjawa 31 Desember 2018
CAMAT KARIMUNJAWA



NIP. 197808121997031002

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PBB- P2 TAHUN 2019
KECAMATAN KARIMUNJAWA
S/D BULAN DESEMBER 2019

No	Desa	Pokok Ketetapan		Jumlah Penerimaan			Sisa Pokok	%	Keterangan
		Jml WP	Jml Pokok	Bulan Lalu	Bulan ini	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Karimunjawa	2.098	248.817.508	150.953.954	0	150.953.954	97.863.554	60.66	
2	Kemujaan	1.850	145.570.766	108.714.089	0	108.714.089	36.856.677	74.68	
3	Parang	744	35.721.863	35.721.863	0	35.721.863	0	100	Lunas Tgl 15 - 08-
4	Nyamuk	225	9.492.900	9.492.900	0	9.492.900	0	100	2019
Jumlah		4.917	439.603.037	304.882.806	0	304.882.806	134.720.231	69.35	Lunas Tgl 2-02-2019

Karimunjawa 31 Desember 2019

CAMAT KARIMUNJAWA



S. KARNANEJENG R.S.STP.MH

Pembina

NRP 19780817199703 1 002